



Program Lingkungan Hidup Indonesia - Jerman (ProLH)

Konteks

Untuk waktu yang lama, sentralisasi dan kurang efektifnya kebijakan lingkungan di Indonesia telah gagal untuk mewujudkan program rehabilitasi sumber daya alam. Kecenderungan ini selanjutnya semakin meningkat disebabkan krisis ekonomi setelah Tahun 1997. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam kemudian tidak diprioritaskan. Sampai dengan tahun 1999 usaha pemerintah pusat dalam upaya melestarikan sumber daya alam ini hanya memiliki pengaruh yang minim. Kemudian pada tahun 1999, kebijakan desentralisasi membuka peluang dibuatnya perencanaan lingkungan yang melibatkan penduduk setempat dalam proses perencanaannya.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Jerman telah bekerjasama selama bertahun-tahun dalam berbagai proyek dengan tujuan untuk menemukan solusi yang inovatif dan adaptif bagi berbagai masalah lingkungan. Keduabelah pihak menyimpulkan bahwa situasi politik dan ekonomi saat ini menuntut peningkatan upaya untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan di dalam agenda politik. Untuk lebih meningkatkan kualitas dan efisiensi dari kerjasama ini sekaligus dalam menghadapi tantangan semakin kompleksnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, kedua pemerintah telah menetapkan pendekatan berbasis program. dengan mengkombinasikan rencana pengelolaan lingkungan wilayah, produksi bersih (bagi industri), pengelolaan kualitas air dan berbagai isu terkait lainnya didalam sistem pengelolaan terpadu, program tersebut mengembangkan potensial sinergi yang di tawarkan oleh stakeholders terkait dengan memberi penekanan terhadap Public-Private-Partnership (Kemitraan-Publik-Swasta).

Kegiatan

Strategi ProLH terfokus dalam Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan setelah krisis keuangan di tahun 1998. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia dianggap sebagai strategi terbaik untuk memperbaiki produktifitas UKM, sehingga menghasilkan daya saing yang lebih baik di pasar lokal, nasional maupun global dan secara simultan memperbaiki dampak sosialnya bagi masyarakat disekitarnya, para pekerja dan mencapai perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan serta klaster industri dan wilayah. Dengan berinteraksi secara dekat dengan lapangan kerja, program ini fokus pada demonstrasi pengelolaan lingkungan terpadu, pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan penyediaan servis kebijakan bagi upaya desentralisasi dalam kebijakan lingkungan disegala tingkatan administratif. Lingkup kerja Program Lingkungan Hidup Indonesia Jerman sebagian besar di wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Jabotabek.

ProLH adalah program kebijakan dan menggunakan pendekatan multi-level untuk mencapai tujuan keseluruhan dan hasil individu masing-masing komponen. Program Utama / Inti adalah pengembangan kebijakan pada tingkat nasional dan regional dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai mitra utamanya, dan menggunakan partisipasi multi stakeholder untuk mengintegrasikan kementerian, departemen dan organisasi lainnya di tingkat nasional dan propinsi terutama di Jawa Tengah. Bagian dari program ini direpresentasikan oleh Komponen 1: Advis Kebijakan Lingkungan dalam perlindungan lingkungan hidup di industri.

Dalam rangka mencapai peningkatan kebijakan, ProLH menggunakan organisasi penyedia jasa di tingkat *intermediate* seperti Pusat Produksi Bersih Nasional dan jejaring Produksi Bersih lainnya, terutama untuk pengembangan kapasitas yang efektif dan lebih fokus, di setiap tingkat pemerintahan dan di sektor swasta yang mengarahkan pengelolaan lingkungan industri, khususnya di usaha skala kecil dan menengah. Strategi ini direpresentasikan oleh Komponen 2: Peningkatan penerapan eko-efisiensi di Usaha Kecil dan Menengah.



Integrasi secara wilayah dari seluruh strategi pada tingkat nasional (peningkatan kerangka kerja kebijakan), pada tingkat lokal di masing-masing perusahaan dan kluster industri dikembangkan pada Komponen 3: Pengelolaan lingkungan wilayah secara terpadu. Melalui Komponen ini proyek percontohan dilaksanakan, multiplikasi dan aplikasi dari kebijakan dan instrumen Produksi Bersih serta insentifnya dilaksanakan, kemudian dievaluasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, serta disebarluaskan kepada seluruh stakeholder terkait.

Dampak

Aplikasi pada Usaha Kecil dan menengah

- Dari hasil kegiatan percontohan pada industri penyamakan kulit, telah tersedia beberapa pedoman seperti: Pedoman Tata Kelola yang Baik (GHK) untuk industri penyamakan kulit dan tekstil; Analisis Keuntungan Biaya bagi Produksi Bersih; Analisis Kesenjangan Peraturan Pemerintah Indonesia pada industri tekstil dan garmen; Analisis Kesenjangan Peraturan Pemerintah Jerman pada konsumen bagi industri tekstil dan garmen; Analisis Kesenjangan Persyaratan Pembeli Migros Eko-label bagi industri tekstil dan garmen; Analisis Kesenjangan Öko-Text Standar 100 bagi industri tekstil dan garmen.

- Diseminasi perangkat eko-efisiensi (Tata Kelola yang Baik, Pengelolaan Bahan Kimia, Pengelolaan Biaya Berbasis Lingkungan, Manajemen Akuntansi Lingkungan) bagi UKM dan juga menyediakan Buku Referensi untuk Produksi Bersih di Indonesia.
- Mengembangkan dan membuat contoh konsep pengembangan Eko-Industrial Estate bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawasan Industri Jababeka.
- Membuat contoh pendekatan terpadu pengelolaan air limbah dan Produksi Bersih untuk sektor batik, tahu

Pengembangan Organisasi

- Mendirikan Pusat Produksi Bersih Nasional dan jejaringnya di tingkat propinsi (P3BD [Pusat Pengembangan Produksi Bersih Daerah] di Jawa Tengah, CPCU [Cleaner Production Clinic Universitas Mulawarman] di Kalimantan Timur)
- Mendirikan perpustakaan Eko-efisiensi dan *database*/manajemen ilmu untuk pelatihan, konsultan, perangkat ekonomi, kisah sukses.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Memfasilitasi pelatihan yang berkaitan dengan Eko-Efisiensi seperti Tata Kelola yang Baik (GHK), Pengelolaan Bahan Kimia (CM), Pengelolaan Biaya Berbasis Lingkungan (EOCM), Manajemen Akuntansi Lingkungan (EMA), *Profitable Social Management* (PSM).

Instrumen Kebijakan Lingkungan

- Temuan selama implementasi akan langsung di aplikasikan dalam pengembangan instrumen kebijakan.



Kontak:

Dieter Brulez (Principal Advisor)
 Program Lingkungan Hidup Indonesia - Jerman (ProLH)
 c/o Kementerian Lingkungan Hidup
 Gedung B, Lantai 5, Jl. D.I. Panjaitan Kav 42
 Jakarta, Indonesia 13410
 Tel/Fax: +62 - (0)21 - 8517186/8516110
 E-Mail: prolh@indo.net.id // Dieter.Brulez@gtz.de
 Website : www.prolh.or.id // www.gtz.de